

BAB I

PENDAHULUAN

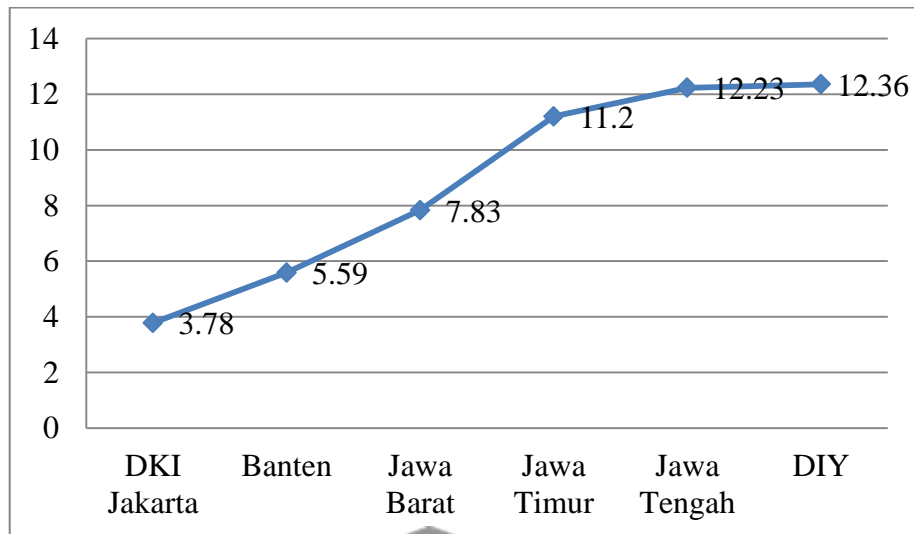
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan identik dengan negara yang sedang berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara yang sedang berkembang sulit untuk menjadi maju. Kesamaan karakteristik negara yang sedang berkembang pada umumnya adalah tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya pun tergolong lambat. Pendapatan perkapita negara yang sedang berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat yakni program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar berpihak kepada lapisan yang paling miskin. Kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal

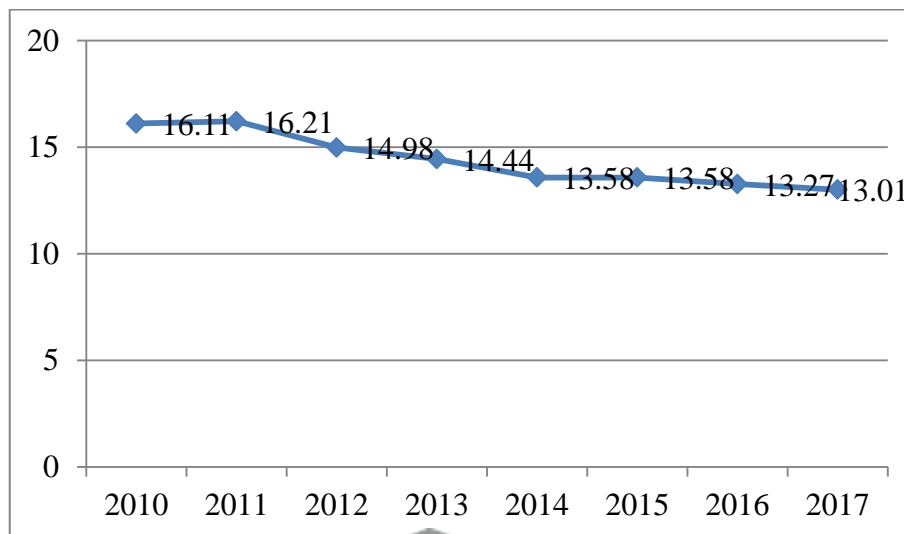
masyarakat miskin. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *head count index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.



Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2017

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2010 hingga tahun 2017 cenderung mengalami penurunan, yakni dari sebesar 13,33 persen pada tahun 2010 menjadi 10,12 persen pada tahun 2017 (BPS, 2018). Tingkat kemiskinan tertinggi di pulau jawa tahun 2017 adalah Provinsi DIY sebesar 12,36 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan yang paling tinggi kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi DIY yaitu sebesar 12,23 persen (Gambar 1.1). Selanjutnya, ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,2 persen, berikutnya Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten masing-masing sebesar 7,83 dan 5,59 persen dan tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,78 persen.



Gambar 1.2. Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2010-2017

Salah satu akumulasi keberhasilan dari pemerintahan Jawa Tengah, dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 16,11% dari jumlah penduduk. Tahun 2009, turun menjadi 13,01% dari jumlah populasi lebih dari 34 juta jiwa (Gambar 1.2). Namun demikian, meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang menurun, angkanya masih yang terbilang tinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di Jawa Tengah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan periode waktu yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang (2018) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015)” bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai 2015 dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Penelitian tentang penerapan metode birespon *spline* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Wulandari (2014) yang berjudul ” Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin dan Pengeluaran Perkapita Makanan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Nonparametrik Birespon *Spline*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui karakteristik penduduk miskin dan pengeluaran perkapita makanan serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhi dan mengetahui hubungan antara variabel variabel yang diduga berpengaruh terhadap penduduk miskin dan pengeluaran perkapita makanan di Jawa Timur dengan menggunakan regresi nonparametrik Birespon *Spline*. Penelitian lain dilakukan oleh Nurdiani (2017) yang berjudul “Regresi Nonparametrik Birespon *Spline*”. Penelitian tersebut memodelkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan membahas tentang indikator kemiskinan di Jawa Tengah menggunakan regresi nonparametrik birespon *spline* dengan variabel respon tingkat kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan dan variabel prediktor indeks kedalaman kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Metode *spline* digunakan karena metode *spline* sangat baik dalam memodelkan data yang polanya berubah-ubah pada sub interval tertentu dan model akan cenderung mencari estimasinya kemanapun data tersebut akan bergerak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang di peroleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mendapatkan model regresi nonparametrik birespon *spline* terbaik untuk memodelkan tingkat kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana kebaikan model pada pemodelan tingkat kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan model regresi nonparametrik birespon *spline* terbaik untuk memodelkan tingkat kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui kebaikan model pada pemodelan tingkat kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Penelitian ini membantu penulis untuk dapat mengaplikasikan metode Regresi Nonparametrik Birespon *Spline* pada kasus kemiskinan.
- b. Bagi masyarakat
Penelitian ini dapat memberi informasi tentang kasus kemiskinan di Jawa Tengah dan beberapa variabel pendukungnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indikator kemiskinan tahun 2017 dengan variabel respon satu tingkat kemiskinan dan variabel respon dua indeks kedalaman kemiskinan. Variabel prediktor yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka.
2. Metode yang digunakan adalah Regresi Nonparametrik Birespon *Spline*. Parameter penghalus (m) dan titik knot optimal diperoleh menggunakan *Mean Square Error* (MSE) minimum. Orde (m) yang di coba adalah orde 2,3, dan 4 untuk setiap variabel respon dengan banyak titik knot maksimal empat titik knot.
3. Mengukur kebaikan model menggunakan Koefisien Determinasi (R^2) dan *Mean Average Percentage Error* (MAPE).